

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2024-2026

KECAMATAN BANJARAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

KECAMATAN BANJARAN

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami Panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Perkenan-Nya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Banjaran Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan.

Renstra Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 disusun sesuai tahapan dan tata cara berdasarkan Permendagri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan mengacu pada Peraturan Bupati Majalengka Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Serta Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Majalengka.

Rencana Strategis ini memuat, Tujuan, Sasaran Kebijakan atau Program serta ukuran keberhasilan dalam kegiatan-kegiatan yang akan segera dilakukan. Dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak baik itu Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, maupun seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Banjaran dalam upaya melaksanakan pembangunan selama Tahun 2024-2026.

Akhirnya semoga Rencana Strategis Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Banjaran pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Majalengka pada umumnya.

Banjaran 6 Desember 2022

Camat Banjaran

Drs. H. DEDI SUPRIADI, M.Si

NIP. 19660501 199403 1 008

DAFTAR ISI

| | Hal |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| Bab I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 9 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 10 |
| Bab II GAMBARAN PELAYANA KECAMATAN BANJARAN | 12 |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi | 12 |
| 2.2 Sumber Daya..... | 19 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan..... | 30 |
| 2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan | 30 |
| Bab III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN | |
| TUGAS DAN FUNGSI | 37 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan | 37 |
| 3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra OPD..... | 46 |
| 3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah | 46 |
| 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis | 47 |
| Bab IV TUJUAN DAN SASARAN | 49 |
| 3.2 Tujuan | 49 |
| 3.3 Sasaran | 49 |
| Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 52 |
| 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Banjaran..... | 52 |
| Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 55 |
| Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG USRUSAN ... | 67 |
| Bab VIII PENUTUP | 70 |

DAFTAR GAMBAR

| | | Hal |
|------------|--|-----|
| Gambar 1.1 | Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Banjaran Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya | 2 |
| Gambar 2.1 | Bagan Organisasi Kecamatan | 18 |

| DAFTAR TABEL | | Hal |
|---------------------|---|-----|
| Tabel 2.2.a | Nama Desa beserta jumlah Dusun, RT dan RW | 20 |
| Tabel 2.2.b | Daftar Nama Pejabat Struktural Kecamatan Banjaran | 20 |
| Tabel 2.2.c | Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan | 21 |
| Tabel 2.2.d | Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan | 21 |
| Tabel 2.2.e | Sarana dan Prasarana Kecamatan Banjaran | 22 |
| Tabel 2.3 | Kinerja Pelayanan Kecamatan Banjaran | 30 |
| Tabel 2.4 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Banjaran | 33 |
| Tabel 3.1 | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka | 39 |
| Tabel 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Banjaran | 50 |
| Tabel 5.1 | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan | 53 |
| Tabel 6.1 | Rencana Dan Capaian Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 | 60 |
| Tabel 7.1 | Indikator Kinerja Kecamatan Banjaran | 68 |

BAB I

PENDAHULUAN

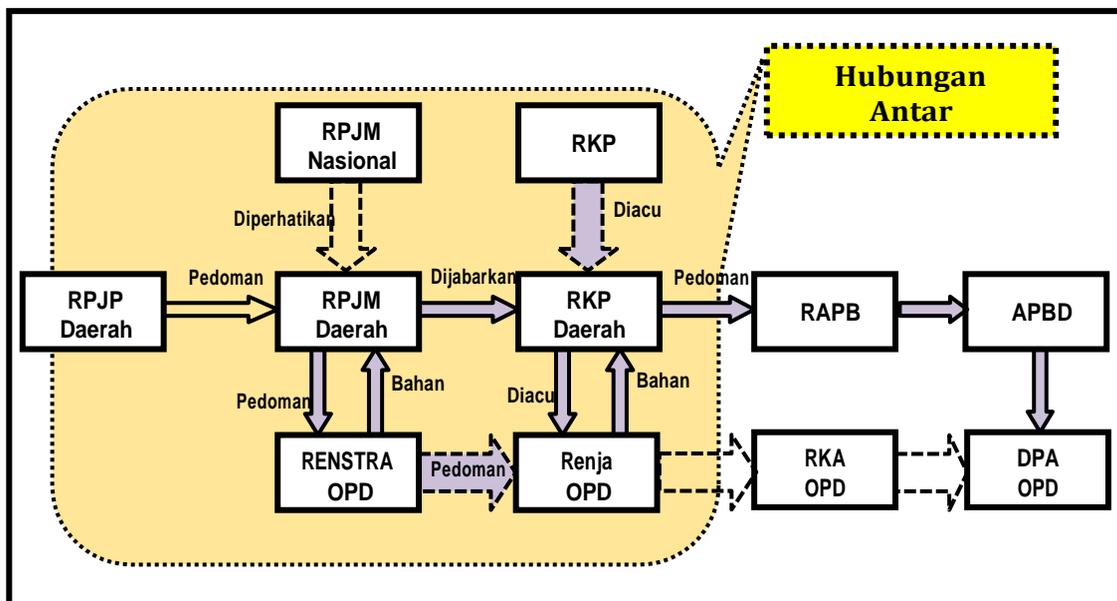
1.1 Latar Belakang

Kecamatan Banjaran sesuai Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Adapun urusan-urusan yang dilaksanakan oleh kecamatan sesuai fungsinya terdiri dari :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan;
2. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
3. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
4. Proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka dilakukan melalui proses dengan melibatkan seluruh stakeholder perangkat kecamatan, UPTD dan pemerintahan desa, sehingga menghasilkan komitmen bersama berupa dokumen perencanaan strategis Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Gambar 1.1

**HUBUNGAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BANJARAN
DENGANDOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA**



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Banjaran Tahun 2024-2026 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah UndangUndang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757));
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); PENDAHULUAN I-10 Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 – 2023;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757));
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26

- Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang PENDAHULUAN I-11 Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); PENDAHULUAN I-12 Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka PENDAHULUAN I-13 Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023 Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 775);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 SeriE, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor

- 236);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018- 2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 252). PENDAHULUAN I-14 Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 – 2023;
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun

2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

41. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Banjaran dimaksudkan untuk memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka 3 (tiga) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap hasil RPJMD menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Kecamatan Banjaran pada setiap tahun anggaran, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan dan memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan yang hendak di capai adalah agar:

1. Tersedianya dokumen perencanaan yang merupakan dukungan Visi dan Misi Kabupaten Majalengka dari Kecamatan Banjaran untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan.
2. Sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan bagi Kecamatan Banjaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Banjaran Tahun 2024-2026 disusun sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**
meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BANJARAN**
meliputi tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Banjaran, sumberdaya Kecamatan Banjaran, kinerja pelayanan Kecamatan Banjaran, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Banjaran, Kelompok Sasaran Layanan.
- BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGI KECAMATAN BANJARAN**
meliputi, Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Banjaran, telaah renstra K/L dan Renstra Kecamatan Banjaran, Telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup Strategi, penentuan isu-
ISU Strategi
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
meliputi, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Banjaran serta hubungan tujuan dan sasaran Kecamatan Banjaran dengan tujuan dan sasaran RPD serta cascading kinerja kecamatan.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Meliputi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Banjaran

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA
PENDANAAN**

menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

menguraikan penjelasan indikator kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, serta penjabaran tentang matriks indikasi program Kecamatan Banjaran Tahun 2024- 2026.

BAB VIII PENUTUP

menjelaskan harapan mengenai pencapaian pembangunan selama kurun waktu tiga tahun.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BANJARAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Banjaran

2.1.1 Tugas

Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka nomor 14 tahun 2016 Peraturan Daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Majalengka, maka ditetapkan Peraturan Bupati nomor 23 tahun 2016 tentang uraian tugas unsur penunjang dilingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka. Kecamatan adalah merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- b. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahandesa atau kelurahan;
- d. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Majalengka, Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan sosial.

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Camat mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Kecamatan.

2.1.1.1 Camat

Camat mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Kecamatan.

Selain melaksanakan tugas Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

2.1.1.2 Sekretaris

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

2.1.1.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang umum dan kepegawaian

2.1.1.4 Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan

2.1.1.5 Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum.

2.1.1.6 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

2.1.1.7 Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

2.1.1.8 Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang Kesejahteraan Sosial.

2.1.2 Fungsi

2.1.2.1 Camat

Dalam melaksanakan tugas pokok Camat mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, sarana dan prasarana umum serta pelayanan dan pendapatan desa.
2. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis Kecamatan;
3. Pembinaan pelaksanaan tugas Kecamatan

2.1.2.2 Sekretaris

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi program kerja Kecamatan;
2. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

3. Pelaksanaan fasilitasi di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan

2.1.2.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian;
2. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang umum dan kepegawaian;
3. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang umum dan kepegawaian.

2.1.2.4 Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
3. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

2.1.2.5 Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
2. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
3. Pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum

2.1.2.6 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

2.1.2.7 Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

2.1.2.8 Kesejahteraan Sosial

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang Kesejahteraan Sosial;
2. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang Kesejahteraan Sosial; dan
3. Pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang Kesejahteraan Sosial.

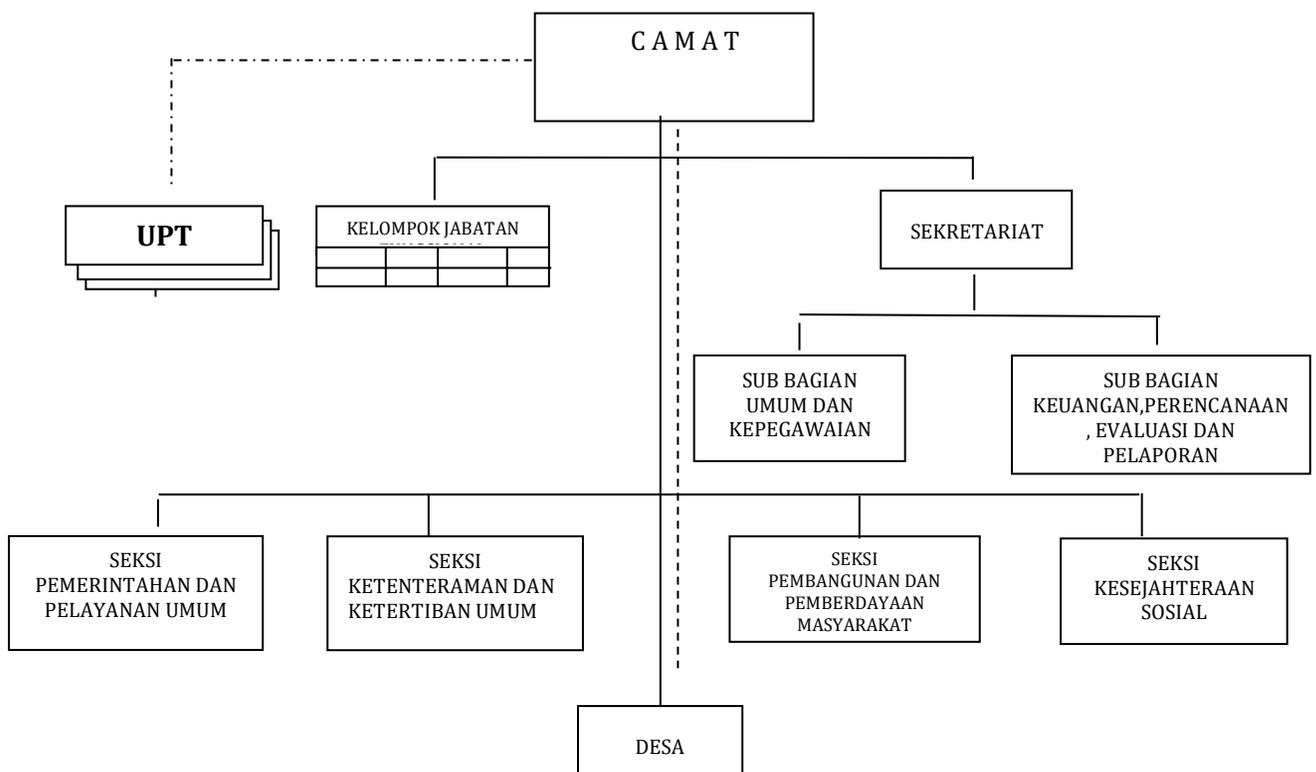
2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Banjaran

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan sosial.

Gambar 2.1.

Bagan Organisasi Kecamatan

(Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Majalengka)



2.2 Sumber Daya Kecamatan Banjaran

2.2.1 Letak Geografis dan Kondisi Sumber Daya Alam

Secara administratif wilayah Kecamatan Banjaran terletak di sebelah Selatan Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kecamatan Bantarujeg
- Sebelah Utara : Kecamatan Argapura dan Maja
- Sebelah Timur : Kecamatan Cikijing
- Sebelah Selatan : Kecamatan Talaga

Kecamatan Banjaran merupakan daerah dataran rendah dan pegunungan, yaitu sebelah utara merupakan daerah dataran rendah dan sebelah selatan merupakan daerah pegunungan. Kecamatan Banjaran terletak pada 6°58'-703' Lintang Selatan dan 108°16'-108°21' Bujur Timur di ketinggian 626 dpl dengan topografi wilayah lereng dan perbukitan. Luas wilayah Kecamatan Banjaran 31,58 Km² yang berarti Kecamatan Banjaran hanya sekitar 2,62 % dari Luas wilayah Kabupaten Majalengka (1.204,24 Km²).

Jumlah penduduk Kecamatan Banjaran sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebanyak 25.772 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 12.823 jiwa dan perempuan sebanyak 12.949 jiwa, jumlah Kepala Keluarga 8.807 KK.

2.2.2 Kondisi Infrastruktur Wilayah

Kecamatan Banjaran merupakan salah satu kecamatan dari 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka, dengan topografi wilayah lereng dan perbukitan, hal ini menjadikan wilayah Banjaran sebagai salah satu sentra hortikultura di Kabupaten Majalengka. Di samping itu Kecamatan Banjaran juga merupakan Daerah yang sangat potensial di bidang Agrowisata karena wilayahnya merupakan kawasan perbukitan dan Pertanian. Kecamatan Banjaran wilayahnya terbagi menjadi 13 Desa, dengan 57 Dusun, 303 RT dan 73 RW. Rinciannya terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.a

Nama Desa beserta jumlah Dusun, RT dan RW

| NO | NAMA DESA | JUMLAH DUSUN | JUMLAH RT | JUMLAH RW |
|---------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 1 | Genteng | 3 | 15 | 4 |
| 2 | Hegarmanah | 3 | 8 | 4 |
| 3 | Sindangpala | 3 | 10 | 4 |
| 4 | Darmalarang | 2 | 16 | 4 |
| 5 | Sunia Baru | 7 | 43 | 7 |
| 6 | Sangiang | 6 | 51 | 8 |
| 7 | Sunia | 7 | 52 | 8 |
| 8 | Kareo | 3 | 10 | 5 |
| 9 | Banjaran | 5 | 28 | 6 |
| 10 | Kagok | 3 | 21 | 6 |
| 11 | Cimeong | 5 | 19 | 6 |
| 12 | Panyindangan | 4 | 9 | 5 |
| 13 | Girimulya | 6 | 21 | 6 |
| JUMLAH | | 57 | 303 | 73 |

2.2.3 Keadaan Aparatur di Kantor Kecamatan Banjaran

Untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka didukung oleh sumber daya sebagai berikut ;

Tabel 2.2.b

Daftar Nama Pejabat Struktural Kecamatan Banjaran

| No. | Jabatan | Nama |
|------------|---|-----------------------------|
| 1. | Camat | Drs. H. Dedi Supriadi, M.Si |
| 2. | Sekretaris Kecamatan | Agung Budiono, S.TP., M.T |
| 3. | a. Kasubag Umum | Dede Arif Rahman, AMd.Kep |
| | b. Kasubag KPEP | Apet Supriadi, SE |
| 4. | Kepala Seksi Pemerintahan | H. duding Solehudin, S.Pd.I |
| 5. | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Aja Sarjono |
| 6. | Kepala Seksi Pemberdayaan Pembangunan Manusia | Jojo Suharjo, S.IP |
| 7. | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial | Ade Suhendra, S.Sos |

Dengan penempatan personil yang tepat diharapkan sinergitas antar lini agar dapat mencapai tujuan organisasi. Personil pada Kecamatan Banjaran sebanyak 15 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.c
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

| No. | Golongan | Jumlah Pegawai | |
|-----|--------------|----------------|-------|
| | | Orang | % |
| 1. | Golongan IV | 2 | 13,33 |
| 2. | Golongan III | 8 | 53,33 |
| 3. | Golongan II | 5 | 33,33 |
| 4. | Golongan I | 0 | 0 |
| | JUMLAH TOTAL | 15 | 100 |

Tabel 2.2.d
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

| No. | Kelompok Jabatan | Jumlah Pegawai | | Keterangan |
|-----|--------------------|----------------|-------|---------------------------------|
| | | Orang | % | |
| 1. | Jabatan Struktural | | | |
| | a. Eselon II | | | - |
| | b. Eselon III | 2 | 13,33 | Camat dan Sekretaris Kecamatan |
| | c. Eselon IV | 6 | 40 | Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi |
| 2. | Fungsional Umum | 7 | 46,67 | Pelaksana |
| | Jumlah Total | 15 | 100 | |

2.2.4 Sarana dan prasarana Kecamatan Banjaran

Tabel 2.2.e.
Sarana dan Prasarana Kecamatan Banjaran

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A TANAH

| No | Jenis Barang/Nama Barang | Nomor | | Luas (M ²) | Tahun Pengadaan | Letak/Alamat | Status Tanah | | | Penggunaan | Asal Usul | Harga (Rp) | Ket. |
|-------------|---|-----------------------|------|------------------------|-----------------|--|--------------|------------|----------------------|--------------------------------|----------------|---------------|------|
| | | Kode Barang | Reg. | | | | Hak | Sertifikat | | | | | |
| | | | | | | | | Tanggal | Nomor | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 1 3 1 01 01 04 001 | 0001 | 1.102 | 1984 | Blok Banjaran Hilir Ds. Banjaran Kec.Banjaran | Pakai | 1984 | sppt 010- 0071 | Kantor Kecamatan, Rumdin | Ek. Bengkok | 45.500.000,00 | |
| J U M L A H | | | | 1.102 | | | | | | | | 45.500.000,00 | |

**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN**

| No | Kode Barang | | | | | | | Nama Barang /Jenis Barang | Nomor Register | Merk/type | Ukuran (cc) | Bahan | Tahun Pembelian | Nomor | | | | Asal Usul Cara Perolehan | Nilai Perolehan (Rp) |
|----------------------|-------------|---|---|----|----|----|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------|-----------------|-------|-------------------|---------------|----------|--------------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Alat - alat Angkutan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 02 | 01 | 04 | 001 | Sepeda Motor | 0014 | Win / MCB | 97 | Besi | 2004 | Honda | MH1HABD104K046348 | HABDE-1046256 | E 3399 U | Pembelian | 9.800.000 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 02 | 01 | 04 | 001 | Sepeda Motor | 0015 | Revo/ NF 100 TD | 100 | Besi | 2008 | Honda | MH1HB61178K455719 | HB61E-1457702 | E 3819 U | Pembelian | 12.000.000 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 02 | 01 | 04 | 001 | Sepeda Motor | 0016 | Revo/ NF11B1D | 110 | Besi | 2009 | Honda | MH1JBC1189K452314 | JBC1E-1437212 | E 3972 U | Pembelian | 11.450.000 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 02 | 01 | 04 | 001 | Sepeda Motor | 0017 | Revo/ NF11B1D | 110 | Besi | 2010 | Honda | MH1JBC117AK978583 | JBC1E-1891991 | E 4073 U | Pembelian | 14.245.000 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 02 | 01 | 04 | 001 | Sepeda Motor | 0031 | NF 11B2C1 M/T | 110 | Besi | 2013 | Honda | | | E 4843 U | Hadiah PBB | 12.825.000 |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 02 | 01 | 04 | 001 | Sepeda Motor | 0032 | Vario/ NC12AF2CBI | 125 | Besi | 2014 | Honda | MH1JFF111EK388259 | JFF1E1386793 | E 4911 U | Bantuan | 16.875.000 |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 02 | 01 | 04 | 001 | Sepeda Motor | 0001 | Win / MCB | 97 | Besi | 2003 | Honda | MH1HABC143KO27110 | HABCE-1026283 | E 3319 U | Bantuan | 10.750.000 |
| 8 | 1 | 3 | 2 | 02 | 01 | 04 | 001 | Sepeda Motor | 0002 | Win / MCB | 97 | Besi | 2003 | Honda | MH1HABC123KO27073 | HABCE-1026213 | E 3320 U | Bantuan | 10.750.000 |
| 9 | 1 | 3 | 2 | 02 | 01 | 04 | 001 | Sepeda Motor | 0003 | Win / MCB | 97 | Besi | 2003 | Honda | MH1HABC153KO27097 | HABCE-1026251 | E 3321 U | Bantuan | 10.750.000 |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 02 | 01 | 04 | 001 | Sepeda Motor | 0004 | Win / MCB | 97 | Besi | 2003 | Honda | MH1HABC153KO27102 | HABCE-1026292 | E 3322 U | Bantuan | 10.750.000 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 02 | 01 | 04 | 001 | Sepeda Motor | 0005 | Win / MCB | 97 | Besi | 2003 | Honda | MH1HABC163KO27380 | HABCE-1025809 | E 3323 U | Bantuan | 10.750.000 |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 02 | 01 | 04 | 001 | Sepeda Motor | 0006 | Win / MCB | 97 | Besi | 2003 | Honda | MH1HABC193KO26333 | HABCE-1025666 | E 3324 U | Bantuan | 10.750.000 |
| 13 | 1 | 3 | 2 | 02 | 01 | 04 | 001 | Sepeda Motor | 0007 | Win / MCB | 97 | Besi | 2003 | Honda | MH1HABC163KO26458 | HABCE-1025708 | E 3325 U | Bantuan | 10.750.000 |
| 14 | 1 | 3 | 2 | 02 | 01 | 04 | 001 | Sepeda Motor | 0008 | Win / MCB | 97 | Besi | 2003 | Honda | MH1HABC183KO26462 | HABCE-1025704 | E 3326 U | Bantuan | 10.750.000 |
| 15 | 1 | 3 | 2 | 02 | 01 | 04 | 001 | Sepeda Motor | 0009 | Win / MCB | 97 | Besi | 2003 | Honda | MH1HABC163KO26461 | HABCE-1025688 | E 3327 U | Bantuan | 10.750.000 |
| 16 | 1 | 3 | 2 | 02 | 01 | 04 | 001 | Sepeda Motor | 0010 | Win / MCB | 97 | Besi | 2003 | Honda | MH1HABC123KO26618 | HABCE-1025854 | E 3328 U | Bantuan | 10.750.000 |
| 17 | 1 | 3 | 2 | 02 | 01 | 04 | 001 | Sepeda Motor | 0011 | Win / MCB | 97 | Besi | 2003 | Honda | MH1HABC183KO26610 | HABCE-1025859 | E 3329 U | Bantuan | 10.750.000 |
| 18 | 1 | 3 | 2 | 02 | 01 | 04 | 001 | Sepeda Motor | 0012 | Win / MCB | 97 | Besi | 2003 | Honda | MH1HABC173KO26596 | HABCE-1025873 | E 3330 U | Bantuan | 10.750.000 |
| 19 | 1 | 3 | 2 | 02 | 01 | 04 | 001 | Sepeda Motor | 0013 | Win / MCB | 97 | Besi | 2003 | Honda | MH1HABC153KO26600 | HABCE-1025881 | E 3331 U | Bantuan | 10.750.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|----|----|-----|--------------|------|-------------|-----|------|------|--------|-------------------|---------------|---|------|---------|-----------|-------------|
| 20 | 1 | 3 | 2 | 02 | 01 | 04 | 001 | Sepeda Motor | 0018 | CS One | 125 | Besi | 2011 | Honda | MH1JBA113BK125183 | JBA1E-1134355 | E | 4199 | U | Bantuan | 14.750.000 |
| 21 | 1 | 3 | 2 | 02 | 01 | 04 | 001 | Sepeda Motor | 0019 | CS One | 125 | Besi | 2011 | Honda | MH1JBA111BK135999 | JBA1E-1134422 | E | 4212 | U | Bantuan | 14.750.000 |
| 22 | 1 | 3 | 2 | 02 | 01 | 04 | 001 | Sepeda Motor | 0020 | CS One | 125 | Besi | 2011 | Honda | MH1JBA116BK125193 | JBA1E-1134427 | E | 4222 | U | Bantuan | 14.750.000 |
| 23 | 1 | 3 | 2 | 02 | 01 | 04 | 001 | Sepeda Motor | 0021 | CS One | 125 | Besi | 2011 | Honda | MH1JBA112BK136305 | JBA1E-1134663 | E | 4226 | U | Bantuan | 14.750.000 |
| 24 | 1 | 3 | 2 | 02 | 01 | 04 | 001 | Sepeda Motor | 0022 | CS One | 125 | Besi | 2011 | Honda | MH1JBA113BK135197 | JBA1E-1134420 | E | 4255 | U | Bantuan | 14.750.000 |
| 25 | 1 | 3 | 2 | 02 | 01 | 04 | 001 | Sepeda Motor | 0023 | CS One | 125 | Besi | 2011 | Honda | MH1JBA112BK125191 | JBA1E-1134496 | E | 4272 | U | Bantuan | 14.750.000 |
| 26 | 1 | 3 | 2 | 02 | 01 | 04 | 001 | Sepeda Motor | 0024 | Jupiter MX | 135 | Besi | 2011 | Yamaha | MH350C001BK246992 | 50C-243924 | E | 4415 | U | Bantuan | 14.087.500 |
| 27 | 1 | 3 | 2 | 02 | 01 | 04 | 001 | Sepeda Motor | 0025 | Jupiter MX | 135 | Besi | 2011 | Yamaha | MH350C001BK246924 | 50C-243833 | E | 4434 | U | Bantuan | 14.087.500 |
| 28 | 1 | 3 | 2 | 02 | 01 | 04 | 001 | Sepeda Motor | 0026 | Jupiter MX | 135 | Besi | 2011 | Yamaha | MH350C001BK244484 | 50C-241827 | E | 4487 | U | Bantuan | 14.087.500 |
| 29 | 1 | 3 | 2 | 02 | 01 | 04 | 001 | Sepeda Motor | 0027 | Jupiter MX | 135 | Besi | 2011 | Yamaha | MH350C001BK246945 | 50C-242998 | E | 4505 | U | Bantuan | 14.087.500 |
| 30 | 1 | 3 | 2 | 02 | 01 | 04 | 001 | Sepeda Motor | 0028 | Jupiter MX | 135 | Besi | 2011 | Yamaha | MH350C001BK246967 | 50C-242990 | E | 4530 | U | Bantuan | 14.087.500 |
| 31 | 1 | 3 | 2 | 02 | 01 | 04 | 001 | Sepeda Motor | 0029 | Jupiter MX | 135 | Besi | 2011 | Yamaha | MH350C001BK246961 | 50C-243884 | E | 4580 | U | Bantuan | 14.087.500 |
| 32 | 1 | 3 | 2 | 02 | 01 | 04 | 001 | Sepeda Motor | 0030 | Jupiter MX | 135 | Besi | 2011 | Yamaha | MH350C001BK246969 | 50C-243909 | E | 4591 | U | Bantuan | 14.087.500 |
| Jumlah Alat - alat Angkutan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 404.057.500 |
| Alat - alat Bengkel dan Alat Ukur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 01 | 03 | 04 | 001 | Mesin Genset | 0001 | Honda Excel | | Besi | 2019 | Honda | | | | | APBD II | 9.982.500 | |
| Jumlah Alat - alat Bengkel dan Alat Ukur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.982.500 |
| Alat - alat Pertanian / Peternakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Alat - alat Pertanian / Peternakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

| Alat - alat Kantor dan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----|----|----|-----|--------------------|-----------|----------|--|--------|------|--|--|--|--|-----------|------------|
| 1 | 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 06 | 051 | Karpet | 0001 | | | Kain | 2006 | | | | | Pembelian | 1.000.000 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 05 | 01 | 04 | 038 | Rak Buku | 0001 | | | Kayu | 2006 | | | | | Pembelian | 1.000.000 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 05 | 01 | 05 | 076 | Teralis | 0001-0002 | Jendela | | Besi | 2007 | | | | | Pembelian | 3.998.000 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 05 | 01 | 04 | 037 | Rak Arsip | 0001 | | | Kayu | 2009 | | | | | Pembelian | 2.500.000 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 01 | 057 | Meja Kursi Tamu | 0001 | | | Kayu | 2014 | | | | | Pembelian | 4.994.000 |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 01 | 002 | Meja Kerja | 0001 | | | Kayu | 2014 | | | | | Pembelian | 4.994.000 |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 05 | 01 | 04 | 005 | Filling kabinet | 0001-0005 | Lufo | | Besi | 2015 | | | | | APBD II | 17.490.000 |
| 8 | 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 01 | 028 | Meja makan | 0001 | | | Kayu | 2015 | | | | | APBD II | 1.490.500 |
| 9 | 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 01 | 028 | Kursi makan | 0001 | | | Kayu | 2015 | | | | | APBD II | 1.985.500 |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 01 | 010 | Tempat tidur | 0001 | | | Busa | 2015 | | | | | APBD II | 2.997.500 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 01 | 057 | Meja/Kursi Tamu | 0002 | | | Jok | 2015 | | | | | APBD II | 2.997.500 |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 01 | 057 | Meja/Kursi Tamu | 0003 | | | Jok | 2015 | | | | | APBD II | 4.994.000 |
| 13 | 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 01 | 057 | Meja/Kursi Tamu | 0004 | | | Jok | 2015 | | | | | APBD II | 11.990.000 |
| 14 | 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 01 | 032 | Kursi putar | 0001 | | | Jok | 2015 | | | | | APBD II | 6.193.000 |
| 15 | 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 06 | 002 | Televisi | 0001-0002 | Samsung | | Mika | 2015 | | | | | APBD II | 11.110.000 |
| 16 | 1 | 3 | 2 | 05 | 03 | 01 | 008 | Meja Kerja Staf | 0001-0004 | | | Kayu | 2016 | | | | | APBD II | 9.993.500 |
| 17 | 1 | 3 | 2 | 05 | 01 | 06 | 026 | Lemari pakaian | 0001 | | | Kayu | 2016 | | | | | APBD II | 2.997.500 |
| 18 | 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 01 | 002 | Meja Kerja | 0002-0005 | 1/2 Biro | | Kayu | 2018 | | | | | APBD II | 14.987.500 |
| 19 | 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 01 | 010 | Tempat Tidur | 0002 | | | Busa | 2019 | | | | | APBD II | 4.994.000 |
| 20 | 1 | 3 | 2 | 05 | 01 | 06 | 026 | Lemari Pakaian | 0001 | | | Kayu | 2019 | | | | | APBD II | 4.977.500 |
| 21 | 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 04 | 001 | Lemari Es / Kulkas | 0001 | Sharp | | Campur | 2020 | | | | | APBD II | 2.497.000 |
| 22 | 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 01 | 048 | Sofa | 0001 | Hitam | | Jok | 2020 | Program Ruang Laktasi/ Menyusui Bag. Kesra | | | | Setda | 2.475.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|----|----|----|-----|----------|-----------|-----------------------|--|------|------|----------------|------------|------------|
| Jumlah Alat - alat Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Alat - alat Keamanan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Alat - alat Keamanan | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Alat Komputer | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 01 | 02 | 001 | Komputer | 0001 | Evance | | Mika | 2010 | | Hadiah PBB | 5.720.000 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 01 | 02 | 001 | Komputer | 0002-0003 | Evance | | Mika | 2010 | | Hadiah PBB | 11.440.000 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 01 | 02 | 001 | Komputer | 0004 | | | Mika | 2011 | | Pembelian | 4.840.000 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 01 | 02 | 002 | Laptop | 0001 | Acer | | Mika | 2016 | | APBD II | 8.992.500 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 01 | 02 | 002 | Laptop | 0002 | Acer | | Mika | 2017 | | APBD II | 23.991.000 |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 01 | 02 | 002 | Laptop | 0003-0004 | Acer | | Mika | 2018 | | APBD II | 19.998.000 |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 10 | 01 | 02 | 002 | Laptop | 0005-0006 | Acer | | Mika | 2019 | | APBD II | 15.950.000 |
| 8 | 1 | 3 | 2 | 10 | 02 | 03 | 003 | Printer | 0001-0003 | Epson L120 | | Mika | 2019 | | APBD II | 5.880.000 |
| 9 | 1 | 3 | 2 | 10 | 02 | 03 | 003 | Printer | 0004 | Epson L130 | | Mika | 2019 | | APBD II | 2.106.000 |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 10 | 01 | 02 | 002 | Laptop | 0007 | Lenovo | | Mika | 2019 | | Hadiah PBB | 5.197.500 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 10 | 01 | 02 | 002 | Laptop | 0008-0009 | Acer | | Mika | 2020 | | APBD II | 17.985.000 |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 10 | 02 | 03 | 003 | Printer | 0005-0006 | Epson L120 | | Mika | 2020 | | APBD II | 3.993.000 |
| 13 | 1 | 3 | 2 | 10 | 01 | 02 | 002 | Laptop | 0010-0012 | Lenovo IdeaPad Slim 3 | | Mika | 2021 | | APBD II | 30.000.000 |
| 14 | 1 | 3 | 2 | 10 | 02 | 03 | 002 | Printer | 0007-0009 | Canon G2020 | | Mika | 2021 | | APBD II | 10.500.000 |
| 15 | 1 | 3 | 2 | 10 | 01 | 02 | 002 | Laptop | 0013-0014 | | | Mika | 2021 | | Hadiah PBB | 24.585.000 |
| Jumlah Alat Komputer | | | | | | | | | | | | | | 191.178.000,00 | | |
| J U M L A H | | | | | | | | | | | | | | 771.231.000,00 | | |

**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG BANGUNAN**

| No | Jenis Barang/Nama Barang | Nomor | | Kondisi Bangunan (B,KB,RB) | Kontruksi Bangunan | | Luas Lantai (M ²) | Letak Lokasi Alamat | Dokumen Gedung | | Luas Tanah (M ²) | Statu s Tanah | Nomor Kode Tanah | Asal Usul | Harga Perolehan (Rp) | Ket. |
|------------------------|---|----------------|----------|----------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|----|------------------------------|---------------|------------------------|-----------|----------------------|---|
| | | Kode Barang | Register | | Bertingkat / Tidak | Beton / Tidak | | | Tanggal/ Tahun | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | |
| Bangunan Gedung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Bangunan Gedung Kantor Kecamatan | 1 3 3 0 0 0 00 | 0001 | B | Tidak | Beton | 341 | Banjara n Hilir Desa Banjara n | 1998 | | | | 0 0 1 0 0 1 1 1 4 1 | Pemd a | 416.571.980,00 | Dibangun 1998, Rehab 2016, Pemeliharaa a n 2017 |
| 2 | Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen | 1 3 3 0 0 0 00 | 0001 | B | Tidak | Beton | 112 | Banjara n Hilir Desa Banjara n | 1998 | | | | 0 0 1 0 0 1 1 1 4 1 | Pemd a | 164.990.500,00 | Penambah a n ruang 2019 |
| 3 | Bangunan Aula | 1 3 3 0 0 0 00 | 0001 | B | Tidak | Beton | 72 | Banjara n Hilir Desa Banjara n | 1998 | | | | 0 0 1 0 0 1 1 1 4 1 | Pemd a | 50.000.000,00 | |
| 4 | Bangunan Parkir Auning | 1 3 3 0 0 3 00 | 0001 | B | Tidak | Beton | 56 | Banjara n Hilir Desa Banjara n | 2015 | | | | 0 0 1 0 0 1 1 1 4 1 | Pemd a | 37.455.000,00 | |
| 5 | Bangunan Kanofi | 1 3 3 0 0 3 00 | 0001 | B | Tidak | Beton | 50 | Banjara n Hilir Desa Banjara n | 2018 | | | | 0 0 1 0 0 1 1 1 4 1 | Pemd a | 49.995.000,00 | |
| Jumlah Bangunan Gedung | | | | | | | | | | | | | | | 719.012.480 | |
| J U M L A H | | | | | | | 631 | | | | 1.102 | | | | 719.012.480 | |

**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**

| No | Jenis Barang/Nama Barang | Nomor | | Konstruksi | Panjang (KM) | Lebar (M) | Luas M ² | Letak/ Lokasi | Dokumen | | Status Tanah | Nomor Kode Tanah | Asal Usul | Harga Perolehan (Rp) | Masa Manfaat (Tahun) | Kondisi (B,KB,RB) |
|------------------|--------------------------|--------------------------|----------|------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------|---------|-------|--------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | Kode Barang | Register | | | | | | Tanggal | Nomor | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 |
| Instalasi | | 1 3 4 03 06 02 004 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Instalasi Listrik | | 0001 | Instalasi | | | | Kantor Kecamatan | 2011 | | Pakai | 0 0 1 0 0 1 1 1 4 1 | Pembelian | 1.718.500 | 40 | B |
| Jumlah Instalasi | | | | | | | | | | | | | 1.718.500 | | | |
| J U M L A H | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 1.718.500,00 | | |

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Banjaran

Tabel 2.3

Kinerja Pelayanan Kecamatan Banjaran

| No. | Indikator Tujuan/Sasaran Renstra | SPM/Standar Nasional | IKK (Indikator Kinerja Kegiatan) | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | | | | Rasio Capaian | | | | |
|-----|---|--|--|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| 1 | Terselenggaranya Pelayanan Publik | meningkatnya kualitas pelayanan publik | Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan | 76 | 77 | 77.5 | 78 | 79 | 79.25 | 78.55 | 100 | 100 | | 104.28 | 102.01 | 129.03 | 128.21 | |
| 2 | Terwujudnya Situasi Aman, Tenram dan Tertib di Masyarakat | Meningkatnya Rasa Aman, Tenram, dan Tertib di Masyarakat | Persentase Penurunan Jumlah Penyakit Masyarakat | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 3 | Jumlah Desa yang meningkat status perkembangannya | Desa Yang Meningkatkan Statusnya | Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Desa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |

Tabel 2.4.a

Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Kecamatan Banjaran Tahun 2019

| Uraian | Anggaran pada Tahun | Realisasi Anggaran pada Tahun | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun | Rata-rata pertumbuhan | |
|---|------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|-----------|
| | 2019 | 2019 | 2019 | Anggaran | Realisasi |
| Program Peningkatan Produktifitas | 15.045.000 | 15.024.200 | 99,86 | 0 | 0 |
| Program Jaminan Sosial | 31.500.000 | 31.488.000 | 99,96 | 0 | 0 |
| Program Penguatan Adat | 28.372.500 | 28.354.400 | 99,93 | 0 | 0 |
| Program Pendidikan Dasar | 7.522.500 | 7.512.100 | 99,86 | 0 | 0 |
| Program Pendidikan Non Formal | 7.522.500 | 7.512.100 | 99,86 | 0 | 0 |
| Program Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan | 7.522.500 | 7.512.100 | 99,86 | 0 | 0 |
| Program Manajemen Kebencanaan | 7.522.500 | 7.512.100 | 99,86 | 0 | 0 |
| Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik | 401.119.500 | 391.056.572 | 97,49 | 0 | 0 |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik | 148.300.000 | 148.111.500 | 99,87 | 0 | 0 |
| Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur | 91.900.500 | 91.798.960 | 99,88 | 0 | 0 |
| Program peningkatan Kesejahteraan Aparatur | 7.522.500 | 7.512.100 | 99,86 | 0 | 0 |
| Program Administrasi Perkantoran | 450.000 | 450.000 | 100 | 0 | 0 |
| Jumlah | 754.400.000 | 749.071.232 | 99,29 | 0 | 0 |

Tabel 2.4.b
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan
 Kecamatan Banjaran Tahun 2020

| Uraian | Anggaran pada Tahun | Realisasi Anggaran pada Tahun | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun | Rata-rata pertumbuhan | |
|--|---------------------------|--|--|--------------------------|-----------|
| | 2020 | 2020 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| PROGRAM PENDUKUNG ADMINISTRASI PERKANTORAN KECAMATAN | 237.609.250 | 237.138.174 | 99,80 | 0 | 0 |
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KECAMATAN | 46.475.000 | 46.385.400 | 99,81 | 0 | 0 |
| PROGRAM PENYUSUN RENCANA, PENGENDALIAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KECAMATAN | 24.960.000 | 24.954.800 | 99,98 | 0 | 0 |
| PROGRAM KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SERTA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM | 11.712.500 | 11.705.000 | 99,94 | 0 | 0 |
| PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 16.50.000 | 16.482.000 | 99,89 | 0 | 0 |
| PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN | 2.687.500 | 2.687.500 | 100 | 0 | 0 |
| PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN | 26.462.500 | 26.460.000 | 99,99 | 0 | 0 |
| PROGRAM PENINGKATAN PERAN KECAMATAN | 96.950.000 | 96.950.000 | 100 | 0 | 0 |
| GAJI | 1.027.663.000 | 934.026.080 | 90,89 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 1.491.019.750 | 1.396.771.254 | 93,68 | 0 | 0 |

Tabel 2.4
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Banjaran Tahun 2021 sampai dengan 2023

| Uraian | Anggaran pada Tahun | | | Realisasi Anggaran pada Tahun | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun | | | Rata-rata pertumbuhan | |
|---|---------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|------|---|-------|------|-----------------------|-----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.277.408.751 | 2.404.632.825 | 2.599.728.294 | 2.202.362.890 | 2.397.161.551 | 0 | 96,70 | 99,68 | 0 | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | 20.995.000 | 37.200.000 | - | 20.995.000 | 0 | - | 100 | 0 | | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 21.000.000 | 3.644.300 | 5.088.300 | 21.000.000 | 3.644.300 | 0 | 100 | 100 | 0 | | |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 11.662.000 | 5.700.000 | 10.000.000 | 11.642.400 | 5.700.000 | 0 | 99,83 | 100 | 0 | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 32.825.000 | 106.625.000 | 54.975.000 | 32.825.000 | 106.625.000 | 0 | 100 | 100 | 0 | | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 415.225.000 | 41.470.000 | 23.060.000 | 414.174.500 | 41.095.000 | 0 | 99,75 | 99,10 | 0 | | |

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Banjaran

2.4.1 Tantangan

Tantangan dalam pengembangan Kecamatan Banjaran secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya.

Secara eksternal *Pertama*, Kecamatan Banjaran lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian dan pertanian. Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Banjaran. Satuan Pol. PP sangat diperlukan kinerjanya dalam mengatasi hal tersebut. Namun, program penertiban sosial ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan peralatan yang memadai. Sama halnya dengan kegiatan penertiban sosial. *Kedua*, Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas. *Ketiga*, Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media social menuntut peran Kecamatan Banjaran harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat. *Keempat*, Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah. *Kelima*, Belum terwujudnya Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan. *Keenam*, belum maksimalnya fasilitas yang tersedia di beberapa tempat wisata di wilayah Kecamatan Banjaran.

2.4.2 Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Banjaran dalam pencapaian dukungan terhadap Misi diantaranya :

1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Banjaran dalam

perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;

2. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Banjaran untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
3. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Banjaran;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Banjaran, terutama dilihat dari posisi Strategi wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Banjaran.
6. Sumber Daya Alam mendukung untuk meningkatkan perekonomian.

Berdasarkan hasil telaah Struktur Ruang Wilayah Kecamatan Banjaran pada RTRW Kabupaten Majalengka bahwasanya Kecamatan Banjaran masuk pada golongan Kawasan PPK (Pusat Pelayanan Kawasan). PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala perkotaan atau beberapa kecamatan. Selain itu juga Kecamatan Banjaran akan di jadikan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan kawasan wisata, industri serta pendukung kawasan perumahan, pertanian dan perikanan.

Sedangkan berdasarkan hasil telaah Pola ruang

wilayah Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka berpotensi sebagai Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pertanian Lahan Basah, Kawasan Pertanian Lahan Kering, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, Kawasan Peternakan, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Industri, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.

BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banjaran dihadapkan kepada permasalahan yang timbul dan merupakan faktor penghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok, sehingga permasalahan yang ada merupakan tantangan yang perlu dikaji dan disikapi agar tugas pokok dan fungsi OPD dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kecamatan merupakan organisasi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks, diantaranya adalah :

1. Koordinasi antar UPTD belum dapat dilakukan secara maksimal
2. Sarana prasarana penunjang kegiatan sangat kurang seperti kendaraan Dinas baik Roda Empat maupun Roda Dua
3. Tata kearsipan belum teratur secara maksimal, karena minimnya tempat penyimpanan arsip/dokumen dan SDM.
4. Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Banjaran belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada;
5. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu komputer, meubelair, dan peralatan lainnya masih kurang;
6. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di Kecamatan Banjaran masih terbatas;
7. Sering terjadi gangguan jaringan Internet sehingga pelayanan administrasi Kependudukan menjadi terganggu;

Permasalahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dimana faktor internal merupakan faktor yang menjadi kewenangan OPD sedangkan faktor eksternal timbul dari faktor diluar kewenangan OPD dalam melaksanakan fungsi pelayanan. Berdasarkan hasil kajian faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan Kecamatan Banjaran diantaranya adalah

A. Faktor Internal

1. Aparatur Pemerintahan

- a. Belum meratanya sumberdaya aparatur pemerintahan
- b. Kinerja aparatur pemerintah masih belum optimal
- c. Secara kualitatif SDM aparatur pemerintahan masih perlu ditingkatkan
- d. Masih kurangnya jumlah karyawan kecamatan untuk melaksanakan pelayanan.

2. Sarana dan Prasarana

- a. Kurangnya sarana dan prasarana berupa kelengkapan administrasi perkantoran
- b. Kurangnya sarana dan prasarana berupa Peralatan Kerja
- c. Kurangnya fasilitas untuk operasional pelayanan bagi pegawai
- d. Kurang lengkapnya faktor penunjang lingkungan kantor untuk melaksanakan pelayanan.

B. Faktor Eksternal, meliputi :

1. Terdapat perubahan ketentuan yang berupa peraturan perundang undangan yang harus menjadi acuan untuk menyusun dan menetapkan serta menentukan kebijakan kewilayahan terhadap rencana program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima tahun) kedepan yang berimplikasi terhadap target kinerja Perangkat Daerah;
2. Homogenitas masyarakat yang menunjukkan karakteristik berbeda-beda di wilayah kecamatan
3. Terdapat bagian wilayah dari pedesaan yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapainya dengan kondisi sarana jalan yang kurang baik
4. Kadang kurang tepatnya sasaran pemberian bantuan dari Pemerintah sehingga menimbulkan kecemburuan dari yang lainnya Hal ini mengakibatkan nilai kebersamaan dan kegotong royongan berkurang dan ada anggapan biar yang ikut dalam kegiatan gotong royong pun yang mendapat bantuan saja.
5. Sarana dan prasarana transportasi kondisinya sudah ada yang rusak.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Banjaran lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut

| | PERMASALAHAN | ISU STRATEGIS | PROGRAM | SUB KEGIATAN |
|---|---|---|---|--|
| 1 | Masih rendahnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Banjaran. Harapan dalam pelaksanaannya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Banjaran | Peningkatan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 11. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>17. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>18. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>19. Pengadaan Mebel</p> <p>20. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>21. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>22. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>23. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>25. Pemeliharaan Mebel</p> <p>26. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>27. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | <p>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 3. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 4. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|---|
| 2 | <p>Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengungkit potensi unggulan desa di wilayah kecamatan Banjaran.</p> <p>Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga bisa meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi unggulan desa, Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kecamatan Banjaran yang semakin lama semakin menghilang, diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong, maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan</p> | Peningkatan pemberdayaan masyarakat | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
|---|--|-------------------------------------|--|---|

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| 3 | <p>Masih rendahnya penguatan kapasitas kinerja aparat pemerintah desa dan kualitas serta kuantitas sarana prasarana infrastruktur perdesaan. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka salah satu</p> | <p>Penguatan kapasitas aparat pemerintah Desa dan Peningkatan</p> | <p>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa |
| | <p>fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa, sehingga dapat menjalankan pemerintahan desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 dan meningkatnya status kemajuan kemandirian desa</p> | <p>Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Infrastruktur Perdesaan</p> | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 5. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan |

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| 5 | <p>Belum terwujudnya secara maksimal pelayanan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.</p> <p>Kecamatan Banjaran termasuk Kawasan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Selain itu juga Kecamatan Banjaran akan di jadikan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, dan pengembangan kawasan wisata. Supaya fungsi pelayanan tersebut dapat sama- sama berkembang, dan kehadiran kegiatan komersial dan pengembangan pariwisata dapat dikendalikan, maka dengan pembinaan yang</p> | <p>Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di Masyarakat</p> | <p>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat |
|---|--|--|---|---|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | <p>lebih maksimal oleh kecamatan bersama pihak terkait lain (Polsek dan Koramil), serta dengan lebih meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, diharapkan dapat memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kondusifitas di wilayah Kecamatan Banjaran.</p> | | | |
| | | | <p>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional |

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD

Telaahan Renstra Kecamatan terhadap Renstra K/L bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam KRP pembangunan, maka dengan hasil telaahan diharapkan dampak dan/atau risiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dimaksudkan agar dalam pelayanan Kecamatan tetap menjaga konsistensi pemanfaatan ruang sebagaimana fungsi dan peruntukannya yang tertuang dalam dokumen RTRW. Selain menjaga konsistensi pemanfaatan ruang, juga dalam pelaksanaan pembangunan perlu memperhatikan dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Faktor- faktor yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu untuk dipedomani.

Karena Kecamatan Banjaran merupakan OPD yang melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, maka permasalahan pelayanan Kecamatan Banjaran tidak dipengaruhi secara langsung oleh Rencana Tata Ruang Wilayah dan Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis, peran Kecamatan Banjaran adalah dalam hal peningkatan pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah tentang pemanfaatan ruang dan berkoordinasi dengan OPD dan stakeholders lain, serta lebih meningkatkan keterlibatan dan peran aktif masyarakat.

Potensi pengembangan wilayah terkait dengan kawasan budidaya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

3.4 Penentuan Isu-isu strategis

Dalam penentuan Isu – Isu Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Banjaran tidak lepas dan harus mengacu kepada Isu-Isu Strategis Kabupaten Majalengka, diantaranya terdapat 7 (tujuh) Isu Stratetgis Pembangunan Majalengka yaitu:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Nilai-Nilai Kehidupan Masyarakat
2. Kemiskinan dan Permasalahan Sosial lainnya
3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Kemandirian Desa
5. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
6. Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat
7. Reformasi Birokrasi

Adapun Penentuan Isu Startegis Kecamatan Banjaran adalah :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Harapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Keamatan Banjaran adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Banjaran.

2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga bisa meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi unggulan desa, Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki

masyarakat Kecamatan Banjaran yang semakin lama semakin menghilang, diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong, maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

3. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa.

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka salah satu fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, sehingga dapat menjalankan pemerintahan desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 dan meningkatnya status kemajuan kemandirian desa.

4. Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Infrastruktur Perdesaan

5. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di Masyarakat.

Kecamatan Banjaran termasuk Kawasan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Selain itu juga Kecamatan Banjaran akan di jadikan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, dan pengembangan kawasan wisata. Supaya fungsi pelayanan tersebut dapat sama-sama berkembang, dan kehadiran kegiatan komersial dan pengembangan pariwisata dapat dikendalikan, maka dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama pihak terkait lain (Polsek dan Koramil), serta dengan lebih meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, diharapkan dapat memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kondusifitas di wilayah Kecamatan Banjaran.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

1.1 Tujuan

Tujuan pembangunan tiga tahun kedepan Kecamatan Banjaran adalah Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan.

1.2 Sasaran

Sasaran pembangunan tiga tahun kedepan Kecamatan Banjaran adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Banjaran

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Target Capaian Kinerja Tahun | | |
|---|---|---------------------------------------|---|--|---|---|--|----------|------------------------------|------|------|
| | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan | Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatkan Pelayanan Kecamatan Terhadap Masyarakat | Meningkatkan Kinerja Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Capaian Sakip Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB |
| | | | | | Meningkatkan Pelayanan Perkantoran | | Capaian SKM Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB |
| | | | | | Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik ditingkat kecamatan | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | | | | Meningkatkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan desa/Kelurahan | Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | Meningkatkan rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat | Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan | Persen | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|--------|-----|-----|-----|
| | | | | Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Peningkatan Wawasan kebangsaan | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | | | Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat desa | Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase desa yang meningkat status perkembangannya | Persen | 10 | 10 | 10 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Banjaran

Strategi merupakan suatu langkah dalam rangka memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun serta berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Kebijakan adalah pedoman pilihan yang dijadikan rumusan Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun selama periode Rencana Strategis Kecamatan Banjaran Tahun 2024– 2026 . serta kebijakan ini diarahkan kepada pilihan pilihan Strategi agar selaras dengan RPD Kabupaten Majalengka serta peraturan perundang undangan yang berlaku.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Kecamatan Banjaran mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan Strategi juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan Strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya disusun Strategi dan arah kebijakan dari Kecamatan Banjaran, sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|--|---|---|
| Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan | Meningkatkan Pelayanan Kecamatan Terhadap Masyarakat | Meningkatkan Kinerja Kecamatan |
| | | | Meningkatkan Pelayanan Perkantoran |
| | | | Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat |
| | | Meningkatkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan desa/Kelurahan | Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa |
| | | | Meningkatkan rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat |
| | | | Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama |
| | Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat desa | Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan rencana tahun (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Majalengka periode 2024-2026.

Adapun Rencana Program, Kegiatan yang terkait perencanaan Tahun 2024 dan 2026, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86, Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mencakup :

Berkenaan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga dengan terbitnya peraturan tersebut menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dibuat berdasarkan nomenklatur yang terkandung dalam peraturan tersebut.

Adapun nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri No. 90 Tahun 2019 tercantum dalam Format Renstra Tahun 2024 – 2026 mencakup :

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

A Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan

. Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

B Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

. yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- a. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
- b. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- c. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

C Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

. yang Dilimpahkan kepada Camat

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

A. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

A Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- b. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Sub Kegiatan Mewujudkan Stabilitas

Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

A Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.
- e. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

6 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA.

A Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- d. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

C Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

D Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Sub Kegiatan Perundang-undangan
- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

dan Konsultasi SKPD

E Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

F Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang . Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel .
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Selengkapnya secara rinci Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka disajikan dalam Tabel 6 Renstra Tahun Anggaran 2024-2026

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
(KECAMATAN) KECAMATAN BANJARAN
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024 – 2026

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KODE | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN | SATUAN | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | LOKASI | | | | |
|---|---------------------------------------|--|-----------------|---|--|----------|---|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|---|------------|--|---------------|--------|------------|--------|------------|
| | | | | | | | | TAHUN (2024) | | TAHUN (2025) | | TAHUN (2026) | | Target | Rp. (juta) | | | Target | Rp. (juta) | Target | Rp. (juta) |
| | | | | | | | | Target | Rp. (juta) | Target | Rp. (juta) | Target | Rp. (juta) | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | | | | | | | | |
| Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan | 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan | Persen | 61 | 100 | 80 | 100 | 85 | 100 | 93 | 100 | 246 | | | | | | |
| | | | 7.01.02.2.01. | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terjalinnnya sinergitas dan efektifitas kegiatan pemerintahan di lingkup kecamatan | Kegiatan | 29 | 3 | 32 | 3 | 35 | 3 | 39 | 6 | 106 | | | | | | |
| | | | 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan PKK tingkat Kecamatan | Event | 29 | 17 | 32 | 17 | 35 | 17 | 39 | 34 | 106 | Kesos | Kec. Banjaran | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|--|---|---------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------------|
| | | | 7.01.02.2.02. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Bulan | 28 | 12 | 36 | 12 | 40 | 12 | 44 | 24 | 119 | | |
| | | | 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Tersedianya data masyarakat miskin termutakhir | Dokumen | 8 | 4 | 12 | 4 | 13 | 4 | 15 | 8 | 40 | Kesos | Kec. Banjaran |
| | | | 7.01.02.2.02.02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar | kali | 7 | 2 | 12 | 2 | 13 | 2 | 15 | 4 | 40 | Kesos | Kec. Banjaran |
| | | | 7.01.02.2.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Umum di Tingkat Kecamatan | Bulan | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 15 | 24 | 40 | PemYanum | Kec. Banjaran |
| | | | 7.01.02.2.04. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Kewajiban Pajak | Persen | 4 | 100 | 12 | 100 | 10 | 100 | 11 | 100 | 21 | | |
| | | | 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Sosialisasi dan Monev PBB | Kali | 4 | 4 | 12 | 4 | 10 | 4 | 11 | 8 | 33 | PemYanum | Kec. Banjaran |
| | | | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persen | 17 | 100 | 50 | 100 | 54 | 100 | 59 | 100 | 113 | | |
| | | | 7.01.03.2.01. | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Tingkat Partisipasi UMKM dalam Pemberdayaan Ekonomi di Tingkat Kecamatan | persen | 17 | 70 | 50 | 70 | 54 | 80 | 59 | 150 | 113 | | |
| | | | 7.01.03.2.01.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah potensi unggulan kecamatan | Jenis | 10 | 2 | 19 | 2 | 20 | 2 | 22 | 4 | 61 | PPM/Kesos | Kec. Banjaran |
| | | | 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah UMKM yang dibina | Kelompok | 7 | 13 | 31 | 13 | 34 | 13 | 37 | 26 | 102 | PPM | Kec. Banjaran |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------|-----|----|-------|----|---------------|-----|------------|-----|------------|-----------|---------------|--|
| | | | | Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase desa yang meningkatkan status perkembangannya | Persen | 198 | 10 | 136 | 10 | 267 | 10 | 163 | 20 | 430 | | | |
| | | | 7.01.06.2.01. | Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terlaksananya | Kali | 198 | 4 | 136 | 4 | 267 | 5 | 163 | 9 | 430 | | | |
| | | | 7.01.06.2.01.05 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Pelaksanaan Pembinaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Kali | 6 | 2 | 25 | 2 | 27 | 2 | 30 | 4 | 82 | PemYanum | Kec. Banjaran | |
| | | | 7.01.06.2.01.06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Terpilihnya Kepala Desa Definitif | Desa | 170 | 0 | | 0 | 119 | 3 | - | 3 | 119 | PemYanum | Kec. Banjaran | |
| | | | 7.01.06.2.01.09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan | kali | 10 | 1 | 19 | 1 | 21 | 1 | 23 | 2 | 63 | PPM | Kec. Banjaran | |
| | | | 7.01.06.2.01.12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Kepemudaan yang mendapat pembinaan | Lembaga / Organisasi | 5 | 3 | 55 | 3 | 60 | 3 | 66 | 6 | 181 | PPM | Kec. Banjaran | |
| | | | 7.01.06.2.01.18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Fasilitasi Lomba Desa | Kali | 7 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 44 | 2 | 121 | Pem Yanun | Kec. Banjaran | |
| | | | | | | | | | | | JUMLAH | | 558 | | 483 | | | |
| PENUNJANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan | x.xx.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Capaian Sakip Perangkat Daerah | Predikat | BB | | BB | 2,907 | BB | 3,058 | BB | 3,364 | BB | 6,422 | | | |
| | | | | Capaian SKM Perangkat Daerah | Predikat | B | | B | 10 | B | 11 | B | 12 | B | 23 | | | |
| | | | | Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Persen | 100 | | B | 472 | B | 518 | 100 | 570 | 100 | 1,088 | | | |
| | | Capaian Sakip Perangkat Daerah | | | Capaian Sakip Perangkat Daerah | Predikat | BB | | BB | 36 | BB | 43 | BB | 47 | BB | 90 | | |
| | | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Keselerasan Renstra dan Renja | Persen | 90 ≤ | | 90 | 36 | 90 | 43 | 90 | 47 | 90 | 90 | | | |
| | | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Dokumen | | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | 3 | 9 | 5 | 24 | KPEP | Kec. Banjaran | |
| | | X.XX.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- | Tersedianya Dokumen Rencana Kerja | Dokumen | | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 12 | KPEP | Kec. Banjaran | |

| | | SKPD | Anggaran | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---|-----------------|---------------|----|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------------|--|
| | | | (RKA) Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | X.XX.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah | Dokumen | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 12 | KPEP | Kec. Banjaran | |
| | X.XX.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah | Dokumen | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 18 | KPEP | Kec. Banjaran | |
| | X.XX.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah | Dokumen | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 18 | KPEP | Kec. Banjaran | |
| | X.XX.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksananya Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah | Kali | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 18 | KPEP | Kec. Banjaran | |
| | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Profil dan LAKIP Perangkat Daerah | Dokumen | 1 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 10 | 4 | 27 | KPEP | Kec. Banjaran | |
| | | | Capaian Sakip Perangkat Daerah | Predikat | BB | | BB | 2,871 | BB | 3,015 | BB | 3,317 | BB | 6,332 | | |
| | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian Realisasi Keuangan Perangkat Daerah | Persen | 90 ≤ | | 90 | 2,871 | 90 | 3,015 | 90 | 3,317 | 90 | 6,332 | | |
| | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | Bulan | 2,727 | 12 | 2,863 | 12 | 3,006 | 12 | 3,156 | 12 | 9,025 | KPEP | Kec. Banjaran | |
| | X.XX.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah | Jenis | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | KPEP | Kec. Banjaran | |
| | X.XX.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran Perangkat Daerah | Jenis | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 18 | KPEP | Kec. Banjaran | |
| | | | Capaian SKM Perangkat Daerah | Predikat | B | | B | 10 | B | 11 | B | 12 | B | 23 | | |
| | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tingkat Pemenuhan Kapasitas ASN Perangkat Daerah | Persen | 78.50% | | 80 | 10 | 80 | 11 | 80 | 12 | 80 | 23 | | |
| | X.XX.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jenis | 9 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 33 | Kasubag Umum | Kec. Banjaran | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | | | Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Persen | 100 | 100 | 239 | 100 | 264 | 100 | 290 | 100 | 554 | | | |
| | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah | Persen | 100 | 100 | 239 | 100 | 264 | 100 | 290 | 100 | 554 | | | |
| | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor | Jenis | 9 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 9 | 8 | 24 | Kasubag Umum | Kec. Banjaran | |
| | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | Jenis | 28 | 27 | 25 | 27 | 28 | 27 | 31 | 54 | 84 | Kasubag Umum | Kec. Banjaran | |
| | X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah | Jenis | 13 | 15 | 61 | 15 | 68 | 15 | 75 | 30 | 204 | Kasubag Umum | Kec. Banjaran | |
| | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Makanan dan Minuman | Bulan | 31 | 12 | 109 | 12 | 120 | 12 | 132 | 12 | 361 | Kasubag Umum | Kec. Banjaran | |
| | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Jenis | 15 | 5 | 12 | 5 | 13 | 5 | 14 | 10 | 39 | Kasubag Umum | Kec. Banjaran | |
| | X.XX.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jenis | 12 | 2 | 13 | 2 | 14 | 2 | 15 | 4 | 42 | Kasubag Umum | Kec. Banjaran | |
| | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | Bulan | - | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 12 | 39 | Kasubag Umum | Kec. Banjaran | |
| | | | Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Persen | 100 | 100 | 75 | 100 | 81 | 100 | 89 | 100 | 170 | | | |
| | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional Perangkat Daerah | Persen | 75 | 75 | 75 | 75 | 81 | 75 | 89 | 75 | 170 | | | |
| | X.XX.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Tersedianya Mebeler Kantor | Jenis | - | 3 | 25 | 3 | 27 | 3 | 30 | 6 | 82 | Kasubag Umum | Kec. Banjaran | |
| | X.XX.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis | 10 | 3 | 25 | 3 | 27 | 3 | 30 | 6 | 82 | Kasubag Umum | Kec. Banjaran | |
| | X.XX.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung | Tersedianya Sarana dan | Jenis | 5 | 2 | 25 | 2 | 27 | 2 | 30 | 4 | 82 | Kasubag Umum | Kec. Banjaran | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja lembaga atau unit kerja, perlu dirancang metode atau teknik dan tata cara yang jelas dan sistematis sebagai instrument penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator pembangunan merupakan tolok ukur pencapaian pembangunan Kecamatan Banjaran dengan memperhatikan Tujuan dan Sasaran yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah 2024-2024 Kabupaten Majalengka Tahun, Indikator Kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian misi Kabupaten Majalengka dan Kecamatan Banjaran Indikator Kinerja Kecamatan Banjaran dapat diuraikan sebagaimana tertuang pada terlampir dalam Tabel 7.1

Tabel 7.1

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kecamatan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | Definisi Operasional | SATUAN | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH | |
|---------------------------|---|-------------------|--|---|--|----------|--------|----------|--------|----------|---------------|----------|------------------|-----------|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Juta Rp. | | |
| | | | | | Target | Juta Rp. | Target | Juta Rp. | Target | Juta Rp. | | | | |
| KECAMATAN BANJARAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 1. | Persentase wargayang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan | Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan | Persen | 100.00 | 73.00 | 100.00 | 79.00 | 100.00 | 86.90 | 100.00 | 165.90 | Kecamatan |
| 2. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN | 1. | Persentase Pemberdayaan masyarakat desadan kelurahan | Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan | Persen | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 54.00 | 100.00 | 59.40 | 100.00 | 113.40 | Kecamatan |
| 3. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 1. | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan | Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum | Persen | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 32.00 | 100.00 | 35.20 | 100.00 | 67.20 | Kecamatan |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|---|--|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|-----------|
| | | | | di tingkat kecamatan | | | | | | | | | | |
| 4. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 1. | Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan | Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan | Persen | 100.00 | 110.00 | 100.00 | 120.00 | 100.00 | 132.00 | 100.00 | 252.00 | Kecamatan |
| 5. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 1. | Persentase desa yang meningkat status perkembangannya | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan | Persen | 10.00 | 136.00 | 10.00 | 267.00 | 10.00 | 162.80 | 20.00 | 429.80 | Kecamatan |
| 6. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | | | 3,253.00 | | 3,444.00 | | 3,788.40 | | 7,232.40 | |
| | | 1. | Capaian Sakip Perangkat Daerah | | Predikat | BB | 2,771.00 | BB | 2,915.00 | BB | 3,206.50 | BB | 6,121.50 | Kecamatan |
| | | 2. | Capaian SKM Perangkat Daerah | | Predikat | B | 10.00 | B | 11.00 | B | 12.10 | B | 23.10 | Kecamatan |
| | | 3. | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | | Persen | 100.00 | 472.00 | 100.00 | 518.00 | 100.00 | 569.80 | 100.00 | 1,087.80 | Kecamatan |

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Banjaran Tahun 2018-2023 disusun untuk dapat diimplementasikan oleh seluruh stakeholders pelaku pembangunan di wilayah Kecamatan Banjaran dimana merupakan hal-hal yang ingin di capai selama kurun waktu lima tahun Tahun berdasarkan Analisis Aspek Strategi baik internal maupun eksternal, berupa kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang.

Diharapkan dengan telah disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Banjaran Tahun 2024-2026, Pembangunan di wilayah Kecamatan Banjaran dapat lebih terarah, terpadu, berdaya guna, dan berhasil guna.

Demikian Rencana Strategis Perubahan (Renstra) Kecamatan Banjaran untuk di pedomani aparatur di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Banjaran.

Camat Banjaran,

Drs. H. DEDI SUPRIADI, M.Si

NIP. 19660501 199403 1 008